

Bingkai Berita Konflik Pengelolaan Objek Wisata Gua Pindul, Gunung Kidul, Yogyakarta

Victoria Sundari Handoko Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

Abstract

Dalam beberapa kasus, media massa selalu menempatkan konflik sebagai isu yang menarik untuk dipublikasikan dan mereka juga memiliki kemampuan untuk membingkai bagaimana cara konflik terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif, bagaimana surat kabar harian lokal yaitu Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja, membingkai peristiwa konflik terkait pengelolaan Gua Pindul, salah satu destinasi wisata populer di Yogyakarta. Untuk membaca secara teliti bagaimana kedua surat kabar lokal ini membingkai konflik, penelitian ini menggunakan teori framing Robert N. Entman dan pendekatan Sosiologi Mediana Reese dan Shoemaker. Hasil penelitian menemukan bahwa kedua surat kabar memiliki pola yang berbeda dalam membingkai isu konflik, terlebih dalam hal penyebab konflik dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Pembingkai berita konflik Gua Pindul oleh Kedaulatan Rakyat lebih menekankan pada ketidakjelasan regulasi pemerintah sehingga memunculkan konflik yang bersifat vertikal yaitu antara Edi Purwanto sebagai anggota DPRD yang akan mendirikan Taruna Wisata dengan pengelola lama wisata (Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Panca Wisata). Sementara itu, Harian Jogja penekanannya lebih pada konflik antara pengelola wisata (konflik horizontal) karena tidak adanya kerjasama diantara mereka. Oleh karena itu, Kedaulatan Rakyat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul proaktif mengatasi masalah ini, sementara itu Harian Jogja lebih menekankan pentingnya deklarasi damai dibandingkan penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Proses produksi media atas konflik wisata tidak bebas kepentingan, Kedaulatan Rakyat menerapkan sudut pandang strukturalis dan Harian Jogja dengan sudut pandang liberal.

Keywords:

Konflik, Framing, Sosiologi Media, Gua Pindul, dan Media Massa

PENDAHULUAN

Media mempunyai peran penting dalam mengartikulasi opini publik dan pengaruhnya pada kebijakan publik. Ini disebabkan media massa mampu untuk mengemas informasi/berita yang dibaca kalayak luas. Pandangan khalayak akibat berita yang disajikan dapat berpotensi mengubah keputusan dari kebijakan publik. Komunikasi antara pemerintah dan publik dimediasi, dibingkai, atau disaring oleh media massa. Oleh karena itu, media

massa berpeluang untuk memiliki agendanya sendiri. Kepemilikan agenda sendiri ini menunjukkan adanya peran kuat media untuk menentukan opini, pilihan, tindakan dan keputusan masyarakat. Proses ini oleh McCombs dan DL Shaw (1972: 177) disebut sebagai teori agenda setting. Teori tersebut menyatakan media massa memberi tekanan pada suatu peristiwa tertentu, media akan menyajikan berita yang dianggap penting oleh pembaca. Dalam

pengertian ini, berita yang dianggap penting oleh media massa, akan dianggap penting pula oleh masyarakat.

Dalam produksi media massa, pengaturan agenda berita dapat dilakukan melalui pembingkaihan berita (Robert N. Entman, 1993). Pembingkaihan merupakan ekspresi kepentingan ideologis, pembentukan konstruksi berita, prioritas dan pemberitaan terstruktur oleh media itu sendiri. Pembingkaihan berita model ini memungkinkan jurnalis menyusun sebuah struktur untuk memberikan makna pada rangkaian peristiwa yang sedang berlangsung sampai dengan menjadi berita.

Dalam teori jurnalistik, Ishwara (2011) menyatakan bahwa semua berita pasti memuat unsur peristiwa, namun tidak semua peristiwa layak menjadi berita. Selanjutnya, Ishwara (2011: 77) menyampaikan peristiwa yang layak menjadi berita salah satunya adalah peristiwa yang mengandung konflik. Hal ini berlaku prinsip *bad news is a good news*. Terkait pemberitaan media tentang konflik, Howard (2003: 22) menyatakan bahwa media seperti “pedang bermata dua”. Di satu sisi, berita bisa menjadi senjata kekerasan yang mengerikan. Ini terjadi ketika pesan berita memanipulasi sentimen publik, seperti: intoleransi,

disinformasi dan berita yang dipelintir, bahkan berita yang menutup aspek-aspek dari peristiwa. Namun di sisi lain, media juga bisa menjadi instrumen resolusi konflik, apabila informasi yang diberikan dapat diandalkan, menghormati hak asasi manusia, dan mewakili pandangan yang beragam.

Jurnalis selalu mengklaim bahwa objektif dan independen selalu dijunjung tinggi. Objektif merupakan klaim jurnalis bahwa mereka telah melaporkan mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadinya, sementara itu independensi merujuk pada posisi dirinya terhadap kasus dimana pemberitaannya telah seimbang, tidak berpihak pada siapapun dan pada kepentingan manapun, serta mengetahui kebenaran serta memberitakannya pada khalayak. Dalam industri media, konflik di masyarakat bukan realitas tunggal dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, media dapat ikut serta menjadi bagian dari konflik atau tetap menjaga jarak dari konflik. Ini berpeluang memperkeruh atau memperjelas suasana. Pada pilihan seperti ini, berbagai media seringkali juga memiliki pemberitaan dan penekanan berita yang berbeda pada suatu peristiwa yang sama. Ini menunjukkan bahwa pemberitaan media

juga tergantung pada posisi dirinya atas kasus, persaingan media dan persepektif jurnalistik yang berbeda. Hal ini menjadikan suatu konflik antar masyarakat dapat dibaca dan disajikan secara berbeda oleh setiap media massa. Situasi tersebut menegaskan apa yang diungkapkan oleh Rivers et.al (2003: 10) bahwa media bukan merupakan saluran komunikasi yang netral atau bebas dari kepentingan, karena sejatinya media/jurnalistik tidak ada yang netral. Jurnalistik atau media "selalu" memiliki keberpihakan tersendiri atas kasus.

Dalam konflik sosial, dimensi tekanan dapat sangat kompleks. Artinya, konflik melibatkan berbagai kepentingan antar bidang, wilayah dan cakupan dimana para pemangku kepentingan saling menekan. Konflik pengelolaan Kawasan Karst Gua Pindul, Desa Bejiharjo, Kecamatan Gunungkidul, Yogyakarta merupakan satu contoh kasus konflik wisata yang menarik. Pusaran konflik kawasan wisata ini telah berlangsung hampir satu dekade. Pariwisata Gua stalaktit-stalakmit terbesar keempat di dunia ini menyita perhatian dan pemberitaan media. Gua ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari kawasan karst yang harus dilindungi. Pemberitaan sekitar konflik, faksi-faksi, dan kawasan dilindungi telah menggiring

banyak aktor masuk dalam pusaran sengketa itu. Penelitian Afala (2013: 33) menunjukkan bahwa konflik Gua Pindul melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemerintah, dan kepentingan personal. Konflik tersebut menggambarkan adanya politik perseteruan (contentious politics), yang bukan merupakan masalah tunggal namun pertautan masalah yang kompleks dari berbagai aktor, sektor, mekanisme, dan proses.

Kompleksitas konflik menjadi persoalan yang penting untuk diurai dan dianalisis melalui pemberitaan media massa. Pasalnya, konflik banyak terjadi dalam pengembangan pariwisata dan semakin mendesak untuk dipecahkan. Berbagai konflik kepentingan, sumberdaya, dan marjinalisasi di masyarakat telah mengemuka di berbagai wilayah dan daerah. Konflik pariwisata terjadi di beberapa provinsi yang diintervensi pemerintah pusat melalui penetapan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPN). Sebagai contoh saja: kasus reklamasi Teluk Benoa di Bali (Provinsi Bali), pembebasan tanah untuk infrastruktur di Kawasan Mandalika (Nusa Tenggara Barat), konflik pembangunan bandara baru di Kulon Progo (DIY), dan lain sebagainya. Terjadilah, differensiasi

antara kelompok elit yang berpotensi "mendominasi suara" dan masyarakat yang hampir "tidak terdengar suaranya". Bagaimanapun, media massa merupakan pilar penting dalam demokrasi sekarang ini. Oleh karena itu, kajian untuk memahami bagaimana media lokal berperan dalam mengemas konflik kawasan wisata seperti kasus Gua Pindul, merupakan pelajaran yang berharga. Hal ini menjadi bentuk evaluasi kritis dan reflektif untuk membingkai konflik kawasan wisata. Diharapkan dengan cara demikian dapat menjaga keseimbangan pemberitaan media massa untuk menyuarakan berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian terkait konflik Gua Pindul telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian terakhir ini dilakukan oleh Priscilla (2014). Penelitian ini menganalisis pembedaan Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat dengan menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini memaknai kata, kalimat, lead, hubungan antarkalimat, foto, grafik, dan perangkat lainnya yang menampilkan bagaimana surat kabar tersebut mengemas pemberitaan. Kemasan berita sekitar konflik Gua Pindul oleh Kedaulatan Rakyat menampilkan

keberpihakan SKH Kedaulatan Rakyat kepada 3 (tiga) pengelola Gua Pindul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pemilihan ini cenderung menggunakan pemilihan kata yang menyudutkan pihak Atiek Damayanti selaku pemilik tanah di atas Gua Pindul. Harian Kedaulatan Rakyat telah berhasil mempengaruhi opini publik dengan tujuan supaya khalayak pembaca memiliki opini yang sama dengan surat kabar tersebut.

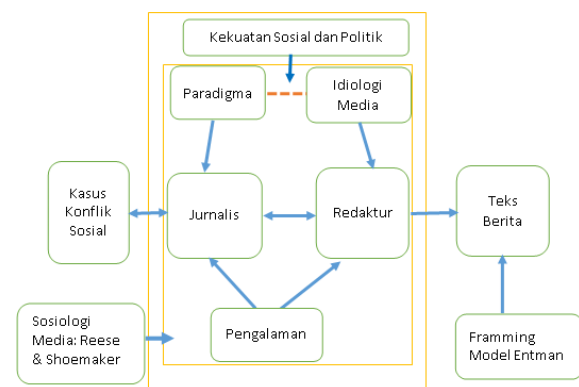
Penelitian Priscilla (2014) tersebut masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan penelitian tersebut terletak pada: 1) ketidakmampuannya menganalisis sumber masalah, penjelasan, dan rekomendasi penyelesaian pada kasus. 2) Kajian bersifat kasus tunggal dan menggunakan surat kabar pemberitaan tunggal. Surat kabar tunggal dipilih, karena surat kabar ini paling populer di masyarakat. Ini tercermin dari oplah terbanyak dan sebaran penjualan yang luas dari harian Kedaulatan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua keterbatasan tersebut mendorong peneliti untuk mempertajam, memperluas dan memperinci penelitian. Artinya penelitian ini perlu menggunakan pendekatan teori yang berbeda, tetapi dengan kasus yang sama dengan analisis

teks pemberitaan dari beberapa surat kabar. Penelitian demikian dipandang relevan dan aktual. Hal ini dikarenakan konflik Gua Pindul belum berakhir. Usaha untuk meretas jalan perdamaian di Kawasan Gua Pindul perlu dilakukan. Analisis pbingkai berita juga tidak hanya dibaca dari teks. Posisi relatif para jurnalis dalam struktur organisasi media, stuktur sosial politik, kekuatan ekstra media, ideologi, latar belakang jurnalis, dan redaktur turut menentukan pbingkai suatu pemberitaan.

Penelitian ini mengambil dua model pendekatan teoritis yaitu model analisis framing Robert N. Entman untuk analisis teks dan Pendekatan Sosiologi Mediana Reese dan Shoemaker untuk menganalisis konteks dari proses produksi berita. Penggabungan dua model pedekatan teoritis ini dipandang memiliki cakupan yang memadai untuk menganalisis rekomendasi penyelesaian yang dibingkai oleh media massa. Kerangka konseptual dari penelitan ini menggabungkan antara analisis framing Entman dan pendekatan Sosiologi Media Reese dan Shoemaker (Gambar 1). Bagian ujung dari gambar tersebut adalah mengambil data dalam bentuk pemberitaan surat kabar, mengolah, dan menganalisis dengan menggunakan elemen pbingkai

berita. Penelitian menarik mundur bagaimana para jurnalis dan redaktur memandang masalah konflik sosial yang terjadi (paradigm), mempertimbangkan dalam suatu konteks masalah yang dialami dan latar belakang dirinya (basic of experience), dan mengambil keputusan produk pemberitaan (news). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks dan konteks dalam proses produksi berita berikut ini.



Gambar 1. Analisis Framing Entman dan Sosiologi Media Reese dan Shoemaker.

Sejatinya, teks disajikan dengan melibatkan suatu keputusan redaksi yang rumit, setidaknya perlu pertimbangan-pertimbangan, melibatkan konteks yang dihadapi para pelaku media itu sendiri. Pemberitaan yang melibatkan konflik horizontal dan struktural di masyarakat yang lebih luas, jurnalis, dan redaktur mempunyai perhitungan-perhitungan khusus. Pada level masyarakat, pemberitaan dapat mempengaruhi terjadinya eskalasi, akumulasi, atau

meredakan konflik sosial. Pada dimensi struktur, ini berkaitan dengan relasi kekuasaan terhadap pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis terlibat. Suatu pertimbangan relasional antara posisi dirinya dengan struktur yang lebih tinggi dan luas cakupannya. Posisi ini mengakibatkan teks pemberitaan tidak netral dan cenderung mengambil bagian dalam upaya menyeimbangkan posisi dirinya dan relasi kuasa yang melingkupinya.

Pandangan tersebut sejalan dengan saran yang disampaikan oleh Reese dan Shoemaker (1996) bahwa konten pemberitaan hasil dari konstruksi realitas. Selanjutnya, mereka menyatakan ada lima faktor yang menentukan konstruksi realitas media yaitu: individu, rutinas media, struktur organisasi, kekuatan ekstra media, dan ideologi. Selanjutnya Reese dan Shoemaker (2016: 407) menyatakan bahwa kajian menganalisis produk pemberitaan yang disajikannya dalam pemberitaan surat kabar yang dikelolanya, serta dampak sosial kultural bagi penyelesaian konflik sosial. Proses ini dipertegas lagi secara eksplisit, pengaruh kekuatan ekstra media terhadap konten media. Hal ini memperlakukan konten berita sebagai variabel dependen yang ditentukan oleh berbagai kekuatan.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Surat Kabar Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja membingkai dan mengkonstruksikan konflik pengelolaan kawasan wisata Gua Pindul, Gunungkidul, Yogyakarta. Tujuan penelitian dengan mempergunakan model analisis framing Entman diharapkan mampu menjawab bagaimana kedua media massa mendefinisikan masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat pilihan moral, dan menekankan penyelesaian konflik di Gua Pindul. Pendekatan Sosiologi Media Reese dan Shoemaker berperan untuk menampilkan dan mengkritisi pembedaan berita yang disajikan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang bagaimana latar belakang, paradigma, dan kekuatan ekstra media mempengaruhi para jurnalis dan redaktur surat kabar untuk memutuskan pemberitaan pada khalayak. Cara ini dapat menampilkan: latar belakang mereka (pengalaman, kepentingan, dan faktor individu lainnya), paradigma (cara pandang, ideologi, dan keyakinan dirinya), serta kekuatan ekstra media (ideologi perusahaan, kondisi sosial-politik) yang melingkupi para pelaku media tersebut. Keseluruhan proses demikian dapat memahami akuntabilitas dan kredibilitas media massa ditengah

menguatnya berita yang dikonstruksi dari realitas akibat persaingan pasar, ideologi media, dan kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Krisyantono (2006: 57) adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, yakni lebih menekankan pada kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya data (kuantitas) data.

Kajian ini meneliti pemberitaan konflik Gua Pindul pada dua surat kabar, yaitu: Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja. Kedua surat kabar memiliki karakteristik yang berbeda. Kedaulatan Rakyat adalah surat kabar yang sudah lama berdiri (1945), termasuk surat kabar tertua di Indonesia. Surat kabar harian ini mempunyai pembaca terbanyak peringkat 6 nasional menurut survei Nielsen Media Research tahun 2011. Tiras Kedaulatan Rakyat mencapai 309.154 eksemplar/hari. Sebaran pembaca di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 19.056 eksemplar/hari (Company Profil Kedaulatan Rakyat, 2015). Sementara itu, Harian Jogja

merupakan surat kabar yang baru berdiri pada tahun 2008. Harian Jogja merupakan anak perusahaan Bisnis Indonesia Group. Oplah Harian Jogja sebanyak 45.000 eksemplar/hari (2013), distribusi tirasnya di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 8.100 eksemplar/hari (Media Kit Harian Jogja, 2013).

Pilihan pendekatan memadukan analisis framing Entman dan pendekatan Reese dan Shoemaker mempunyai implikasi metode sebagai berikut. Pendekatan analisis framing Entman meliputi proses berikut. Pertama, pengumpulan data (berita) dari kedua surat kabar. Berita konflik Gua Pindul dipilih untuk tahun 2013. Pertimbangannya, selama tahun tersebut terjadi konflik yang memanas dan melibatkan berbagai pelaku, seperti: pemilik tanah, anggota DPRD, pengelola wisata, dan sebagainya. Saat itu, konflik sudah mengarah pada penggunaan kekerasan fisik antar aktor terlibat. Kedua, menentukan time frame. Pemberitaan kedua media tentang peristiwa konflik direpresentasi dalam pemberitaan peristiwa konflik berlangsung (situasi konflik), dampak konflik, puncak konflik, dan proses penyelesaian konflik. Tabel 1 berisi tentang tanggal dan judul berita yang

disajikan oleh Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja (Februari dan Maret 2013). Ketiga, dipilih masing-masing 4 (empat) berita yang memuat isu perkembangan konflik, sehingga terkumpul 8 (delapan) pemberitaan berikut ini. Kedelapan pemberitaan dianggap representatif menampilkan kasus.

Tanggal	Judul Berita	
	Kedaulatan Rakyat	Harian Jogja
16 Februari 2013	Anggota Dewan Dirikan Kantor Baru : Ditentang Pengelola Gua Pindul	Pengelola Rebutan Pindul
28 Februari 2013	Dampak Konflik Pengelolaan Gua Pindul: Kunjungan Turun 60 Persen	Pengunjung Pindul Merosot
8 Maret 2013	Konflik Antarpengelola Memanas: Gua Pindul Ditutup, Edi Dievakuasi	Pindul mencekam: Anggota DPRD Dievakuasi Polisi
14 Maret 2013	Sultan Minta Pemkab Mediasi Kasus Gua Pindul: Pengerahan Massa Tak Selesaikan Konflik	Dukungan Deklarasi Damai Pindul mengalir Deras

Tabel 1: Daftar Media, tanggal, dan Judul Berita Konflik Gua Pindul

Proses selanjutnya menganalisis dengan teknik analisis framing Entman. Hal ini meliputi pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, dan membuat pilihan moral dan menekankan

penyelesaian. Keempat tahapan itu merupakan elemen framing untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat dan mendukung suatu gagasan tersebut. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2007: 189-191).

Pendekatan Reese dan Shoemaker mempunyai metode dan tahapan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data primer. Ini dilakukan dengan wawancara mendalam para jurnalis dan redaktur yang terlibat langsung penulisan berita. Kedua, wawancara mendalam disusun dalam transkrip wawancara dan catatan-catatan selama proses wawancara dikerjakan. Ketiga, reduksi data dilakukan dengan membangun tema-tema terkait dan sesuai dengan proses pemingkaihan berita surat kabar. Keempat, data display. Hal ini merupakan langkah memodelkan dan menampilkan data agar bisa dimaknai dan direfleksikan dalam unsur dan elemen pemingkaihan berita.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Framing Berita Konflik Pengelolaan Gua Pindul oleh SKH Kedaulatan Rakyat
 Pemilihan berita konflik pengelolaan

Gua Pindul di SKH Kedaulatan Rakyat berdasarkan pada saat peristiwa konflik berlangsung (situasi konflik), dampak konflik, puncak konflik, dan proses penyelesaian konflik. Empat berita konflik yang dikaji tersebut berjudul: pertama, Anggota Dewan Dirikan Kantor Baru: Ditentang Pengelola Gua Pindul (KR1); kedua, Dampak Konflik Pengelolaan Gua Pindul: Kunjungan Turun 60 Persen (KR2); ketiga, Konflik Antarpengelola Memanas: Gua Pindul Ditutup, Edi Dievakuasi (KR3); dan keempat, Sultan Minta Pemkab Mediasi Kasus Gua Pindul: Pengerahan Massa Tak Selesaikan Konflik (KR4). Berikut ini adalah hasil analisis data dengan menggunakan analisis framing model Entman.

Berita KR1 bingkai utamanya adalah konflik Gua Pindul disebabkan oleh Edi Purwanto (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul) yang akan mendirikan kantor baru Taruna Wisata ditentang oleh pengelola-pengelola lama Gua Pindul (Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Panca Wisata). Dalam berita ini secara jelas ditegaskan bahwa konflik Gua Pindul disebabkan oleh Edi Purwanto yang diduga akan menguasai Gua Pindul. Penguasaan Gua pindul menyebabkan keresahan pengelola-pengelola lama.

Untuk menguatkan itu, maka pernyataan Koordinator Pengelola Panca Wisata dikutip. Edi Purwanto selaku anggota dewan harusnya mengayomi rakyat dan bukan justru membuat resah. Hal ini menegaskan bahwa konflik yang dibingkai lebih bersifat vertical yaitu antara anggota DPRD dengan pengelola-pengelola lama objek wisata Gua Pindul. Saran penyelesaian masalah dalam berita ini adalah pemerintah perlu menyusun regulasi karena keributan pengelolaan Gua Pindul akibat ketidakjelasan regulasi pemerintah. Artinya bahwa pemerintah belum melakukan upaya penyelesaian konflik dan melalui berita ini, SKH Kedaulatan Rakyat berupaya mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui regulasi pemerintah.

Dalam KR2 bingkai utama yang ditampilkan adalah konflik antar pengelola Gua Pindul berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata yang turun drastis. Penyebab masalah dari penurunan wisatawan akibat konflik antarpengelola Gua Pindul. Jumlah kunjungan yang semula tiap hari rata-rata 300 wisatawan, sekarang hanya dalam kisaran 120-140 orang atau menurun sekitar 60 persen. Penurunan jumlah wisatawan mencapai titik terendah dibanding sebelumnya. Keputusan moral diambil oleh Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul yang berprinsip bahwa pengelolaan objek wisata Pindul lebih diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan tujuan adanya desa wisata, merupakan upaya mensejahterakan masyarakat. Sikap ini menekankan adanya keberpihakan pemerintah pada masyarakat dan bukan pada Edi Purwanto selaku anggota DPRD dan Atiek Damayanti pemilik tanah di atas Gua Pindul. Untuk itu, penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah mempercepat rumusan draf rancangan peraturan daerah (raperda) pengelolaan kepariwisataan yang mengatur pengelolaan pariwisata, termasuk di dalamnya objek wisata Gua Pindul.

Bingkai utama KR3 menekankan semakin memanasnya konflik antara warga Bejiharjo dengan pihak Edi Purwanto anggota DPRD Gunungkidul dan Atiek Damayanti. Penyebab masalahnya adalah Kelompok Taruna Wisata pimpinan Edi Purwanto anggota DPRD Gunungkidul, serta Rusmanto dan Marsudi atas nama Forum Warga Bejiharjo untuk Pindul (FWBP) dan Atiek Damayanti menutup paksa Gua Pindul dengan alasan akan melakukan pembongkaran bangunan diatas gua. Warga Bejiharjo menjadi emosi dan mengakibatkan tim pengamanan

Polres, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja mengevakuasi Edi Purwanto dan rombongannya. Pembingkai Kedaulatan Rakyat terhadap penentuan nilai moral yang ada dalam berita ini adalah tindakan Edi Purwanto yang memicu kemarahan warga Bejiharjo yang dianggap semena-mena dengan menutup gua secara sepihak. Akibatnya, warga emosi dan menggeruduk. Pihak Edi Purwanto akhirnya tertahan di sekitar mulut gua. Penyelesaian masalahnya melalui jalur mediasi TNI, Polri, Musyawarak Pimpinan Kecamatan Karangmojo dan Pemkab Gunungkidul. Pihak Edi Purwanto dan Atiek Damayanti diminta oleh warga untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan turut campur lagi dalam aktivitas penutupan Gua Pindul dan apabila mengingkari kesepakatan bersedia dituntut di pengadilan.

Berita yang dibingkai KR4 menekankan peran Pemkab Gunungkidul yang fokus dan mengupayakan mediasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Gua Pindul. Upaya tersebut dikatakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat

Tabel 2 Bingkai Berita Konflik Pengelolaan Gua Pindul dan Empat Elemen pembentuk frame berita.

No	Judul Berita	Elemen			
		Definisi Masalah	Penyebab Masalah	Evaluasi Moral	Rekomendasi Penyelesaian.
1	Anggota Dewan Dirikan Kantor Baru: Ditentang Pengelola Gua Pindul	Edi Purwanto selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul akan mendirikan Taruna Wisata ditentang pengelola lama.	Edi Purwanto diduga pengelola lama akan menguasai Gua Pindul	Edi Purwanto harusnya mengayomi warga	Pemerintah perlu menyusun regulasi karena keributan pengelolaan Gua Pindul akibat ketidakjelasan regulasi pemerintah
2	Dampak Konflik Pengelolaan Gua Pindul: Kunjungan Turun 60 persen	Jumlah kunjungan wisata turun drastis	Konflik antar pengelola Gua Pindul sehingga jumlah kunjungan wisata turun drastis	Pemerintah diharapkan lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata untuk mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan	Penyelesaian masalah adalah desakan pada pemerintah untuk penyusunan Peraturan Daerah untuk pengelolaan Gua Pindul
3	Konflik antar Pengelola memanas Gua Pindul ditutup, edi dievakuasi	Semakin memanasnya konflik di Gua Pindul	Edi Purwanto anggota DPRD Gunungkidul dan Atiek Damayanti menutup paksa Gua Pindul untuk pembongkaran bangunan di atas Gua Pindul	Tindakan Edi Purwanto memicu kemarahan warga	Mediasi antara Edi Purwanto dan Atiek Damayanti dengan warga Desa Bejiharjo, serta pembuatan surat pernyataan bermaterai oleh kelompok Atiek yang berjanji tidak akan ikut campur lagi dalam penutupan Gua.
4	Sultan minta Pemkab mediasi Kasus Gua Pindul: Pengerahan Massa Tidak Selesaikan Konflik	Peran Pemkab Gunungkidul memediasi pihak-pihak yang berkonflik.	Izin Gangguan (HO) Atiek Damayanti ditolak	Pentingnya pihak-pihak yang bersengketa untuk tidak berpendapat sendiri dan mengklaim sebagai kebenaran	Permintaan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk meminta Bupati Gunungkidul sebagai mediator konflik.

Sumber: Berita SKH Kedaularan Rakyat tentang Konflik Pindul bulan Februari – April 2013.

sebagai upaya yang maksimal dan paling yang diberitakan dalam artikel ini adalah objektif dilakukan. Penyebab masalah Atiek Damayanti yang merasa tidak puas

dengan proses administrasi terkait hak atas pengelolaan Gua Pindul. Izin gangguan (HO) yang diajukan Atiek Damayanti tidak disetujui karena dianggap tidak memenuhi syarat. Pihak pemerintah menyatakan kalau Atiek tidak puas maka dipersilakan ke Pengadilan Tinggi Negeri. Penentuan nilai moral dalam pemberitaan Kedaulatan Rakyat terdapat dalam kutipan berita, di mana ditekankan dalam artikel ini adalah pentingnya pihak-pihak yang bersengketa untuk tidak berpendapat sendiri dan mengklaim sebagai kebenaran. Pernyataan ini seakan ditujukan kepada Atiek Damayanti (pemilik tanah di atas Goa Pindul) yang tidak puas karena izin HO nya ditolak oleh pihak Pemkab Gunung Kidul. Atiek diminta untuk menghormati hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku. Penyelesaian masalah dalam pemberitaan ini adalah permintaan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk meminta Bupati Gunungkidul sebagai mediator konflik. Disamping itu, pemerintah kabupaten juga diminta melakukan sosialisasi tentang pemahaman produk perundang-undangan yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Tampaknya jalan akhir dari persoalan ini adalah produk hukum yang jelas untuk dapat melihat secara lebih jernih persoalan ini, sehingga tidak memunculkan klain-

klaim subjektif dari pihak-pihak yang bersengketa.

Framing Surat Kabar Harian Jogja

Pemilihan berita konflik pengelolaan wisata alam Gua Pindul seperti halnya pemilihan berita dalam SKH Kedaulatan. Empat berita yang dikaji adalah: pertama, Pengelola Rebutan Pindul (Harjo1); kedua, Pengunjung Pindul Merosot (Harjo2), ketiga, Pindul mencekam: Anggota DPRD Dievakuasi Polisi (Harjo3); dan keempat, Dukungan Deklarasi Damai Pindul mengalir Deras (Harjo4).

Bingkai utama yang ditampilkan Harjo1 adalah rebutan pengelolaan objek wisata minat khusus Gua Pindul sejak objek wisata tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Penyebab masalahnya yaitu rencana pembangunan sekretariat Taruna Wisata milik Edi Purwanto meresahkan pengelola lama Gua Pindul. Keresahan terjadi karena Taruna Wisata mengklaim bahwa pihaknya adalah pengelola kawasan wisata paling sah berdasarkan ijin dari pemilik tanah Gua Pindul (Atiek Damayanti), sementara pengelola lainnya adalah illegal. Hal ini menegaskan bahwa konflik yang dibingkai lebih bersifat horizontal yaitu antara pengelola baru dengan pengelola-pengelola lama. Penilaian moral berita ini dijatuhkan

kepada Taruna Wisata sebagai pengelola baru karena kehadirannya telah memunculkan keresahan diantara pengelola lama dan mengganggu kenyamanan wisatawan. Untuk mendukung pernyataan itu, pihak Harian Jogja mengutip pernyataan pengelola wisata Dewa Bejo yang menganggap kehadiran pengelola baru akan menambah padat objek wisata Gua Pindul sehingga mengganggu kenyamanan wisatawan. Pengelola-pengelola lama tidak ingin ada gesekan fisik diantara mereka. Penyelesaian masalah tidak ditampilkan dalam pemberitaan ini, Harian Jogja memilih untuk menyajikan fakta-fakta berita terkait perebutan dalam pengelolaan wisata.

Dalam Harjo2 bingkai beritanya menekankan pada masalah jumlah pengunjung Gua Pindul yang menurun drastis. Penyebab masalahnya terletak pada Atiek Damayanti dan Edi Purwanto. Atiek Damayanti mengklaim tanah di atas Gua Pindul dan menganggap ketiga pengelola Gua Pindul illegal. Di sisi lain Edi Purwanto menggagas berdirinya Taruna Wisata. Akibat munculnya dua aktor ini maka terjadi konflik di kawasan Gua Pindul sehingga berdampak sistemik pada kawasan wisata yaitu penurunan jumlah pengunjung wisata. Penekanan

moral yang ditekankan adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak akan mengambil alih pengelolaan Objek Wisata Minat Khusus Gua Pindul. Sebaliknya, Pemkab mendukung pengelolaan oleh masyarakat sebagai pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Penyelesaian masalah yang disarankan adalah penyusunan dengan segera Raperda Pengelolaan Wisata yang diharapkan akan membantu terselesainya polemik pengelolaan Gua Pindul. Payung hukum itu diharapkan bisa menyelesaikan polemik Pindul.

Bingkai berita Harjo3 menggambarkan konflik yang terus terjadi di Gua Pindul dan semakin mencekam. Penyebab masalah adalah Edi Purwanto dan kelompoknya akan mendirikan sekretariat baru (Taruna Wisata) dan pemasangan spanduk yang berisi penutupan sementara Gua Pindul yang mendapatkan perlawanan dari warga. Penilaian atas Edi dan kelompoknya sebagai sumber masalah ini datang dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Edi dan kelompoknya yang dinilai telah menyulut kemarahan warga dan menuntut kelompok Edi Purwanto untuk menghentikan aktivitasnya. Selain itu, Edi diminta membuat surat pernyataan dan pihak kepolisian terpaksa harus

No	Judul Berita	Elemen			
		Definisi Masalah	Penyebab Masalah	Evaluasi Moral	Rekomendasi Penyelesaian
1	Pengelola Rebutan Pindul	Rebutan pengelolaan objek wisata Goa Pindul karena munculnya pengelola-pengelola baru	Keresahan pengelola lama terhadap pengelola baru (Taruna Wisata) yang dikelola Edi. Muncul istilah "legal dan "illegal"	Kehadiran Taruna Wisata memunculkan keresahan diantara pengelola lama dan efeknya jelek untuk wisatawan	Tidak ada. Hanya penyajian fakta-fakta
2	Pengunjung Pindul Merosot	Jumlah pengunjung Pindul menurun drastis	Atiek Damayanti mengklaim tanah diatas Goa Pindul dan menganggap tiga pengelola ilegal. Edi Purwanto menggagas berdirinya Taruna Wisata.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak mengambil alih pengelolaan, tetapi menyerahkan kepada masyarakat	Penyusunan Raperda pengelolaan wisata
3	Pindul mencekam: anggota DPRD Dievakuasi Polisi	Keributan antara ratusan orang dan pemilik lahan (Atiek)	Edi Purwanto dan kelompoknya yang akan mendirikan sekretariat baru (Taruna Wisata dan pemasangan spanduk penutupan Gua Pindul	Tuntutan warga supaya Edi dan kelompoknya menghentikan aktivitas pembangunan wisata, pembuatan surat pernyataan, dan evakuasi Edi oleh polisi.	Penggunaan jalur mediasi antara kelompok yang berkonflik.
4	Dukungan Deklarasi damai mengalir deras	Deklarasi Damai dari Ikatan Keluarga Besar Bejiharjo (IKKB)	Deklarasi damai menjadi solusi penyelesaian masalah	Penyelesaian masalah secara dialogis dan musyawarah termasuk deklarasi damai daripada jalur hukum	Pelaksanaan Deklarasi damai oleh Keluarga Besar Bejiharjo (IKKB)

Sumber: Berita SKH Harian Jogja tentang Konflik Pindul bulan Februari-April 2013.

mengevakuasi Edi Purwanto dan lebih pada pernyataan anggota DPRD kelompoknya dari lokasi konflik. Gunungkidul Arif Setiadi untuk Penekanan penyelesaian masalahnya menggunakan jalur mediasi, tanpa

tindakan yang menyulut emosi. Hal ini karena banyak pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pengelolaan Gua Pindul. Apabila mediasi tidak tercapai, dimungkinkan kasus ini dibawa ke ranah hukum.

Bingkai berita Harjo⁴ menekankan pada proses deklarasi damai yang digagas oleh Ikatan Keluarga Besar Bejiharjo (IKKB). Deklarasi damai diharapkan mampu mengatasi konflik di Gua Pindul dan mempererat rasa kekeluargaan warga Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul. Penyebab masalahnya masih pada sengketa yang terjadi diantara warga Bejiharjo.

Penilaian moral pada berita ini ada pada upaya penyelesaian sengketa secara dialogis dan musyawarah, termasuk dalam deklarasi damai daripada penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Upaya ini dibingkai Harian Jogja sebagai bentuk penyelesaian masalah yang lebih baik dibandingkan cara jalur hukum, agar semua pihak merasa puas. penyelesaian masalah yaitu dengan deklarasi damai yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Besar Bejiharjo (IKKB).

Pembingkai Teks Berita Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja

Secara umum, pembingkai yang ditampilkan SKH Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja dapat ditarik kesimpulan. Permasalahan yang diambil oleh SKH Kedaulatan Rakyat adalah konflik yang bersifat vertikal yaitu antara Edi Purwanto anggota DPRD dan Atiek Damayanti pemilik tanah di atas Gua Pindul dengan pengelola wisata Gua Pindul (Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Panca Wisata). Edi Purwanto sebagai anggota DPRD dinilai sebagai pihak yang seharusnya lebih mengayomi masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang berkonflik dengan masyarakat. Sementara itu, permasalahan yang dibingkai oleh Harian Jogja lebih menekankan konflik antarpengelola wisata (konflik horizontal) yaitu antara pengelola lama (Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Panca Wisata) dengan Edi Purwanto dan Atiek Damayanti sebagai pengelola baru wisata. Oleh karena itu, nilai moral yang ditekankan adalah Edi Purwanto selaku pemimpin Taruna Wisata seharusnya bisa bekerjasama dengan pengelola lama.

Penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kedaulatan Rakyat pun lebih bersifat top down yaitu melalui Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meminta Bupati Gunungkidul menjadi

mediator dalam konflik tersebut. Pemerintah kabupaten juga diharapkan melakukan sosialisasi tentang pemahaman produk perundang-undangan yang tepat untuk menyelesaikan konflik sehingga menghindarkan salah satu pihak yang selalu menganggap dirinya sebagai pihak yang paling berhak atas kawasan Gua Pindul. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata sangat penting karena menurut Utami pemerintah berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata. Pemerintah adalah pemegang kebijakan (Utami, 2013: 86). Sementara itu, Harian Jogja cenderung menyerahkan persoalan ini pada perlunya penyelesaian melalui cara bottom up yaitu dari masyarakat sendiri melalui jalur damai (deklarasi damai).

Analisis Konteks Berita Konflik Gua Pindul

Setelah melakukan analisis teks, maka analisis konteks dilakukan sebagai bentuk verifikasi pada hasil analisis teks atas pemberitaan Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja. Peneliti mewawancarai wartawan dan redaktur Kedaulatan Rakyat, yaitu Pak J (redaktur) dan Pak BP (wartawan senior). Selain itu wawancara juga dilakukan kepada wartawan Harian

Jogja yaitu Pak H (wartawan) dan Pak G (Editor).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa agenda Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan konflik Gua Pindul karena isu ini terkait banyak pihak dan banyak kepentingan. Menurut Pak BP, wartawan senior SKH Kedaulatan Rakyat, penyelesaian konflik Gua Pindul menjadi tidak tuntas karena adanya pembiaran dan ketidaktegasan pihak Pemda Kabupaten Gunung Kidul, berikut ini:

“Konflik Gua Pindul terjadi berawal dari pembiaran pemerintah dan tidak adanya komunikasi dengan pemilik lahan Damayanti atas kepemilikan tanah Pindul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seperti menutup mata.” (Wawancara 10 November 2017).

Sementara itu terkait sosok Edi Purwanto, Pak B menilai dia adalah pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan di tengah pusaran konflik antara Pokdarwis Taruna Wisata bentukannya dan Pemerintah Desa Bejiharjo yang tidak memiliki komitmen apapun sebelumnya. Pokdarwis Taruna Wisata bersikap sepihak dan berada di luar jalur komitmen dari pengelola lain yang sudah ada sebelumnya. Maka, kunci dari persoalan ini adalah upaya pemerintah dalam menerapkan regulasi yang menurutnya

akan dapat mengatasi konflik antar para pengelola.

Hal senada juga disampaikan Pak J yang menjadi redaktur pada saat konflik Gua Pindul ini mulai marak. Menurutnya, resolusi dalam konflik ini adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu upaya Kedaulatan Rakyat dalam menyajikan informasi ini secara berulang-ulang, dengan tujuan mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan konflik ini. Dilihat dari hasil wawancara, terbaca jika Kedaulatan Rakyat yang memiliki pengaruh besar dalam arus informasi publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki beberapa pertimbangan dalam menyajikan informasi berita, yaitu: (1) menyajikan berita untuk kepentingan masyarakat banyak; (2) kompetensi narasumber dalam kasus Pindul; dan (3) dapat mengakomodir informasi berita yang memberikan kemanfaatan ekonomi secara langsung kepada pihak redaksi (iklan/advertorial).

Pak J mengatakan bahwa pihaknya menerapkan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi, berimbang, dan tidak menunjukkan keberpihakan pada pihak lain.

“Kalau menulis konflik saya tidak menulis satu pihak tapi mesti dua pihak. Saya bilang ke wartawan

pokoknya harus ketemu pihak lain, kalau tidak ketemu tidak saya turunkan beritanya. Jadi tidak hanya Dewa Bejo saja tapi yang lain juga dikonfirmasi, agar masyarakat juga mendapatkan informasi yang jernih tidak hanya berat sebelah. Wartawan kan bisa saja tidak objektif karena dia kan dekat dengan narasumber.” (Wawancara 9 November 2017).

Bahkan secara terang-terangan Pak J mengatakan pihaknya tidak pernah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak dalam lingkaran konflik Gua Pindul, meskipun ada nuansa yang dibangun Kedaulatan Rakyat dengan kehadiran Atiek Damayanti dan Edi Purwanto. Atiek digambarkan sebagai pihak yang tidak dibenarkan tindakannya karena hanya mementingkan pihaknya saja, tidak memikirkan kemanfaatan untuk masyarakat umum.

Sementara itu, Redaksi Harian Jogja tidak menyalahkan pemilik tanah di atas Gua Pindul (Atiek Damayanti), menurut Pak U, Atiek Damayanti bukanlah pihak yang bersalah karena pihaknya memang memiliki izin atas kepemilikan lahan itu secara sah. Hanya perlu dilakukan upaya mencari jalan tengah agar persoalan ini tidak berlarut-larut, terutama memiliki kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Pak U menyatakan bahwa:

“Waktu itu saya ada dua fokus juga, pokoknya tentang pemberdayaan

masyarakat sekitar dan kemajuan pariwisatanya. Karena bagi warga sekitar juga lumayan. Masyarakat yang sudah ada disitu lama, yang banyak mengelola sudah mendapatkan dampak dari wisatawan, nah dengan adanya konflik yang terus menerus, ini kan mengurangi wisatawan atau dampak buruk bagi wisatawan.” (Wawancara 6 November 2017).

Terkait dengan sumber masalah, Harian Jogja juga menyoroti posisi Edi Purwanto yang membingungkan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus sebagai pengelola. Maka, Pak U mengatakan pihaknya juga pernah menyoroti posisi Edi Purwanto yang menurutnya juga harus diposisikan netral sebagai narasumber.

“Edi itu kan, dia buka itu kan atas nama Atiek. Kalau sebagai pihak media, maka semuanya sama posisinya karena sama-sama pengelola. Sehingga punya hak yang sama juga.” (Wawancara 6 November 2017).

Untuk mengatasi masalah ini, Harian Jogja tidak berupaya mendesak penyelesaian masalah secara vertikal yaitu melalui Sri Sultan Hamengku Buwono X seperti yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat. Meskipun Harian Jogja mempunyai hubungan dengan pihak keluarga Sultan dalam usaha Surat kabar Harian Jogja, akan tetapi terkait dengan

kasus Gua Pindul penyelesaian masalahnya tidak melalui Sultan, berikut ini menurut Pak G:

“Harjo tidak punya kepentingan atas Pindul. Sultan juga tidak ada. Mungkin ada tetapi pihak Harjo tidak pernah mengulik-ulik persoalan kepentingan Sultan atas Pindul. Walaupun warga juga sempat sowan ke Sultan sebagai raja.” (Wawancara 6 November 2017).

Penyelesaian masalah menurut Pak G lebih mendesak penyelesaian dari masyarakat yaitu melalui deklarasi damai yang digalang oleh penduduk Gunungkidul yang merantau. Upaya ini lebih baik karena penduduk bisa duduk bersama bermusyawarah dan menghasilkan keputusan terbaik dibandingkan melalui jalur hukum yang bisa jadi akan merugikan pihak yang saling berkonflik. Pak G menegaskan bahwa Harian Jogja dalam menyajikan informasi beritanya juga selalu berupaya untuk berimbang dalam menyajikan berita, termasuk dalam menampilkan narasumber dari kedua belah pihak yang berkonflik (cover both side). Sebagai bagian dari rutinitas berita, jika ada berita yang hanya menyajikan satu narasumber, maka akan terus digali

dominan. Gua Pindul merupakan cerita sukses harian ini untuk mengekspresikan sudut pandang pemilik, jurnalis dan redaktur, sekaligus menyuarakan kepentingan rakyat (masyarakat lokal kawasan Gua Pindul). Dalam kasus seperti ini sering disebut sebagai “media advokasi”.

Media advokasi cenderung menghasilkan ketegangan struktur. Media seperti ini selalu memelihara relasi kuasa dengan struktur-struktur ekstra media agar ketegangan dan tekanan tidak kontra produktif, bagi surat kabar itu sendiri maupun bagi masyarakat yang diperjuangkannya. Nampak sekali, harian ini juga cenderung dominan mewawancarai pelaku utama dalam struktur: Bupati, Sri Sultan Hamengkubuwana X, DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan sebagainya. Melalui jurnalis yang bertugas di istana berusaha memperoleh pernyataan Sultan. Pernyataan digunakan sebagai alat penekan dan konfirmasi struktur dibawahnya untuk segera menyelesaikan kasus. Keseimbangan relasi kuasa diperhitungkan sebagai faktor yang sangat penting. Hal ini dinyatakan oleh Pak J, sebagai berikut:

“Dalam rangka mendorong Bu Badingah (Bupati Gunungkidul) untuk menyelesaikan kasus. Surat

kabar ini kan tidak perlu bilang bupati harus begini, harus begitu. Sultan sebagai gubernur dan posisi bupati berada dibawah kekuasaannya, kok tidak cepat bertindak. Nah itu, kita memakai bahasa sanepan, sanepo yang harus dikedepankan. Tidak perlu berkata keras.” (Wawancara tanggal 9 November 2017).

Selanjutnya, Pak J juga mengatakan jurnalis yang di lapangan, seringkali terlibat dan berempati dengan kasus. Ini membuat pilihan kata-kata yang tidak halus atau kadang bombastik. Bahasa jurnalistik dipandang harus melihat berbagai kepentingan dan menjaga struktur, agar pesan dapat tersampaikan. Lebih lanjut, Pak J menyampaikan:

“Ada Bahasa yang terlalu kasar, biasanya terlalu bombastis. Terlalu kasar dalam arti tidak cocok dipergunakan tidak sesuai dengan tatanan masyarakat khususnya di Yogyakarta, bagaimana selain bahasa, kemudian dia harus memilih rasa bahasa. Rasa bahasa terkait dengan diksi, pilihan kata.” (Wawancara 9 November 2017).

Uraian redaktur diatas menampilkan bahwa kekuatan ekstra media menentukan pilihan struktur dan pelaku yang diwawancarai, sekaligus penggunaan bahasa yang memerlukan rasa bahasa yang sesuai dengan struktur dan budaya suatu masyarakat. Media seperti ini mempunyai kedekatan dengan struktur

yang direpresentasi dengan bahasa dan rasa bahasa dari struktur. Pada keadaan struktur memiliki kepentingan yang sama (dalam hal ini memberdayakan rakyat sebagai kebijakan utama), maka strategi pemingkakan media berhasil mendorong “pernyataan” Sultan, dan menggerakkan struktur (bupati, kepolisian, pemerintah desa, dan sebagainya) untuk bertindak. Kemampuan membahasakan struktur, surat kabar ini sering nampak sebagai bagian dari pembela kepentingan struktur. Dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara media dan struktur, surat kabar cenderung “tidak berdaya” dalam memperjuangkan rakyat.

Berdasarkan kasus Gua Pindul, pilihan berbeda dilakukan oleh Harian Jogja. Semboyan harian ini: “Berbudaya, Membangun Kemandirian”. Dari semboynya, harian ini lebih memilih sudut pandang sebagai koran bisnis. Bagi pebisnis, intervensi dari orang luar atau struktur cenderung dihindari. Itulah kemandirian. Dengan kata lain, sekiranya pebisnis mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, mengapa kebijakan pemerintah harus dipaksa ada. Kebijakan pemerintah seringkali lebih mengaburkan persoalan. Cara pandang ini lebih dominan menyuarakan kepentingan pelaku ekonomi. Hal ini merupakan karakteristik

dari harian yang menganut sudut pandang liberal. Karakteristik perusahaan seperti ini bersifat bebas dari kekuasaan struktur.

Pemingkakan berita yang dilakukan oleh Harian Jogja menampilkan kenyataan tersebut. Usaha menempatkan surat kabar yang bersifat bebas dari kekuasaan struktur, tercermin pada anggapan bahwa konflik bersifat horisontal. Konflik Gua Pindul dipahami sebagai konflik antar pengelola jasa wisata. Atiek melalui Edi berniat untuk mengelola jasa wisata (pelaku bisnis) di Gua Pindul adalah pilihan yang sah, karena mereka mempunyai hak yang sama dengan warga masyarakat yang terhimpun di Pokdawis (pelaku bisnis komunitas). Penghargaan atas kepemilikan dan hak-hak atas tanah juga harus ditegakkan, pelaku bisnis komunitas juga harus diberi ruang. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui hubungan bisnis yang setara dan dibangun melalui sistem kontrak yang sempurna (*complete contract between business to business*). Sultan sudah jelas komitmennya, tahta untuk rakyat, kata Pak U, redaktur Harian Jogja. Suara ini merupakan representasi pemilik. Salah satu pemilik saham media ini adalah keluarga kasultanan. Sultan tidak harus dilibatkan pada perkara seperti kasus Gua Pindul. Bupati harus menjadi fasilitator

yang baik dan jembatan yang baik untuk mendewasakan pelaku bisnis dan pelaku bisnis komunitas dalam membangun kemitraan. Bahkan, tanpa peran bupati, bisnis jasa wisata di Gua Pindul dapat berjalan sendiri dengan langkah damai dengan meminjam pernyataan menekan dari Ikatan Keluarga Besar Bejiharjo (IKKB).

PENUTUP

Simpulan

Simpulan hasil penelitian bingkai konflik pengelolaan kawasan wisata Gua Pindul oleh Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja melalui analisis teks dan konteks sebagai berikut:

1. SKH Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja memiliki perbedaan sudut pandang terkait pihak-pihak yang paling bertanggungjawab sampai dengan penyelesaian masalahnya. Sumber masalah menurut Kedaulatan Rakyat ada pada ketidakjelasan regulasi pemerintah. Oleh karena itu, pihak yang dianggap paling bertanggungjawab pada kasus ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diharapkan proaktif mengatasi masalah konflik yang bersifat vertikal. Penyelesaian konflik

melibatkan Sultan yang meminta Bupati Gunungkidul untuk memediasi konflik. Sementara itu, Harian Jogja penekanannya lebih pada tidak adanya kerjasama antara pengelola lama dan pengelola baru wisata Gua Pindul (konflik horisontal) dan usulan penyelesaian masalahnya melalui deklarasi damai.

2. Dalam kasus konflik wisata ini, Kedaulatan Rakyat mempunyai sudut pandang strukturalis, sementara Harian Yogya lebih memilih sudut pandang sebagai koran bisnis atau liberal. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan sudut pandang media menentukan pemberitaan. Kekuatan sudut pandang bekerja melalui cara melihat masalah, aktor yang dianggap penyebab, pelibatan struktur, dan menentukan konten berita yang disajikan.

Saran

Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak dapat digeneralisasikan karena sifatnya yang terikat pada konteks atau kasus berita yang dianalisis. Ideologi media yang dipergunakan oleh surat kabar bisa berbeda ketika kasus berita yang

diangkat berbeda. Kelemahan ini bisa dipergunakan oleh peneliti lain untuk meneliti pada kasus-kasus yang berbeda dalam jumlah kasus yang lebih banyak di dua surat kabar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afala, Laode Machdani. (2017). Menalar dinamika konflik wisata Goa Pindul. *Journal of Governance*. Volume 2, No. 1. Juni 2017. Hal 18-35.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), pp. 51-58.
- Eriyanto. (2007). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Howard, R. (2003). *The power of the media, A handbook for peacebuilders*. European centre for conflict prevention (ECCP). Amsterdam: Bureau M&O.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Boston: Northeastern University Press.
- Ishwara, Luwi. (2011). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta
- McCombs, Maxwell and Donald Shaw. (1972). *The agenda-setting function of mass media: Public Opinion Quarterly*, 36, 1972, 176-187
- Ningsih, Restika Cahya. (2013). Kontribusi Objek Wisata Goa Pindul Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 14, No. 1. Hal. 67-79. Yogyakarta.
- Prasetya, L. Juni Andi. (2011). *Kompetisi Surat Kabar Lokal Berdasarkan Tingkat Kepuasan Biro Iklan Pada Layanan Jasa Media Surat Kabar (Kompetisi Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Bernas Jogja, Kompas Jogja, Harian Jogja Berdasarkan Perhitungan Superiority Direction dan Superiority Magnitude pada Anggota PPPI DIY)*. Skripsi. UAJY.
- Priscilla, Claudya. (2014). Analisis framing pemberitaan sengketa lahan Goa Pindul di Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat. *Thesis*, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Reese, S., dan Shoemaker, P. (1996). *Mediating the message: Theories of influence on mass media content*. New York: Longman.
- Reese, Stephen D. dan Shoemaker, Pamela J. (2016). *A media sociology for the networked public sphere: The*

- hierarchy of influences model. Mass Communication & Society*. Division of the Association for Education in Journalism and Mass Communication.
- Rivers, William L. dkk. (2003). *Media massa dan masyarakat modern*. Prenada Media.
- Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, tanggal 16 Februari 2013, 28 Februari 2013, 8 Maret 2013, dan 14 Maret 2013.
- Surat Kabar Harian Jogja, tanggal 16 Februari 2013, 28 Februari 2013, 8 Maret 2013, dan 14 Maret 2013.
- Utami, Santi Muji. (2013). Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Semarang. Dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 40 No. 1 Juni 2013. Hal 84-96.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- Sanusi, A. (2017). *Sistem Nilai*. Nuansa Cendekia. Bandung
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.